

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Agus Rizki Kurniawan
NIM. E42010007

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
E-mail : agusrizki2891@gmail.com

ABSTRAK

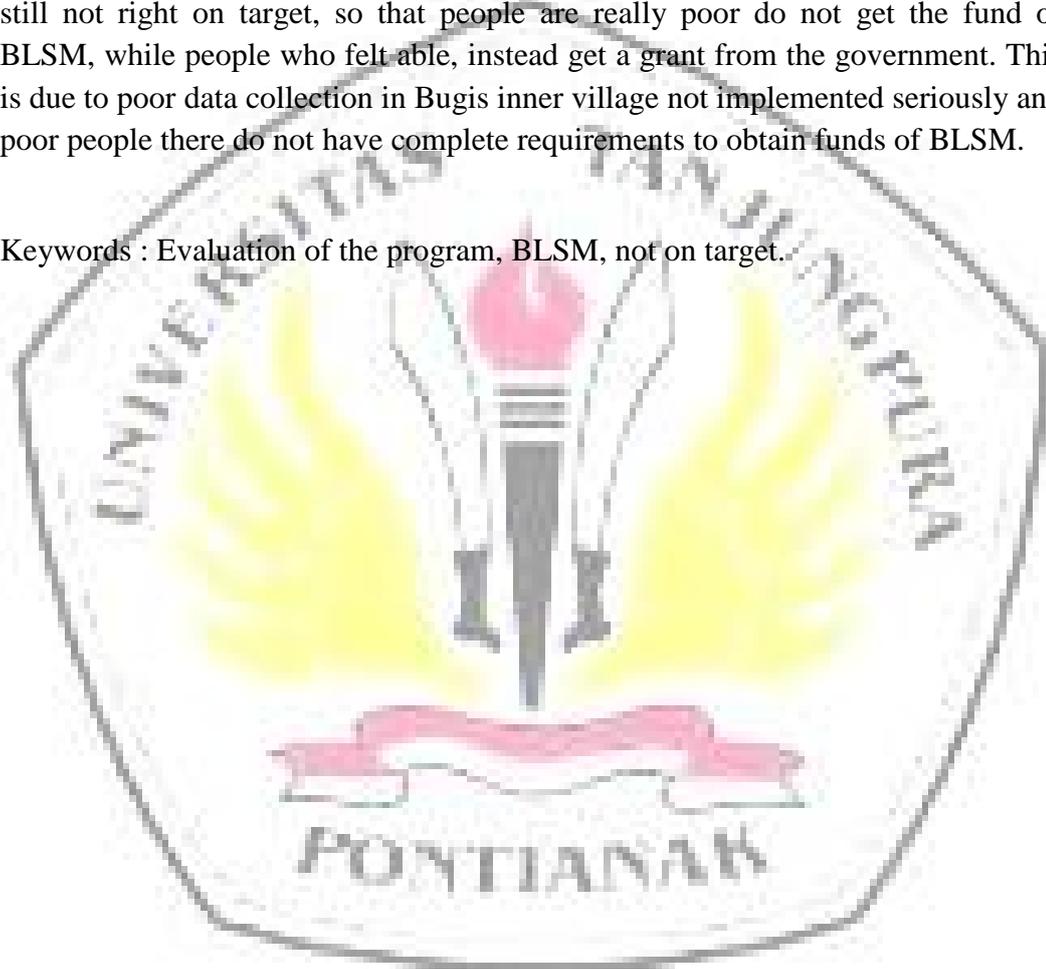
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah kajian evaluasi suatu pelaksanaan program bantuan yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bahwa di Kelurahan Dalam Bugis masih ketidaktepatan sasaran kepada rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program BLSM ini masih belum tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan dana BLSM, sedangkan masyarakat yang dirasamampu, malah mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pendataan terhadap masyarakat miskin di Kelurahan Dalam Bugis kurang serius dalam menanganinya dan tidak lengkapnya syarat-syarat yang dimiliki masyarakat miskin untuk mendapatkan dana BLSM.

Kata-kata Kunci :Evaluasi Program, BLSM, Tidak Tepat Sasaran.

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate the implementation of the program of assistance to the poor people, whether accomplished in accordance with the objective. The title of this research is based on problems about the implementation of temporary direct assistance public (BLSM) in Bugis inner village that are still not well targeted to poor people. This study used a qualitative approach with a descriptive research, research sites in Bugis inner village Pontianak city. Results of studies have shown that in the process of implementing this program BLSM still not right on target, so that people are really poor do not get the fund of BLSM, while people who felt able, instead get a grant from the government. This is due to poor data collection in Bugis inner village not implemented seriously and poor people there do not have complete requirements to obtain funds of BLSM.

Keywords : Evaluation of the program, BLSM, not on target.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh UUD tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan tersebut sangat diharapkan oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan untuk seluruh rakyat ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Selanjutnya program kesejahteraan rakyat bukan semata-mata untuk mengatasi dampak dari adanya bencana alam, kerusakan (konflik etnis/suku/agama), pelaksanaan otonomi daerah, masalah perbatasan dan disintegrasi melainkan juga untuk mengatasi dan memerangi kemiskinan. Akibat dari meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional, yang tentu pula mempengaruhi harga BBM dalam negeri sejak awal maret 2005, kemudian mempengaruhi juga kenaikan harga barang-barang pokok sehari-hari (Sembako), yang pada gilirannya memperlemah daya beli masyarakat, maka lahirlah Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005, tentang Bantuan Tunai kepada rumah tangga-rumah tangga miskin, yang dikeluarkan pada tanggal 10

September 2005. Dimana pembahasan lebih lanjut pada taraf pelaksanaannya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri pada tanggal 16 september 2005, yang memandang bahwa pelaksanaan BLT sudah siap dilaksanakan. Program Bantuan Langsung Tunai ini dilaksanakan pada tahun 2005 dan 2008, pada saat tahun 2008 program BLT ini di ubah dengan program Bantuan Sementara Langsung Masyarakat yang biasa disebut dengan (BLSM). Karena dianggap gagal oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, fungsi dari program BLSM sama dengan program BLT sebelumnya yaitu untuk membantu beban masyarakat miskin. Program Bantuan langsung Sementara Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan (BLSM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui program BLSM ini diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, seperti ketahanan pangan keluarga miskin dan secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan produktivitas keluarga miskin. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat belum terjangkau secara menyeluruh berdasarkan jumlah keluarga miskin yang ada serta belum tepatnya sasaran penerima program bantuan tersebut, Karena penerimaan bantuan program

BLSM tersebut yang di tetapkan oleh pemerintah pusat relatif lebih kecil dari realita jumlah keluarga miskin penerima manfaat yang ada di Kalimantan Barat. Adapun realita yang terjadi di masyarakat dalam permasalahan program BLSM sebagai berikut:

1. Pengelolaan data masyarakat dirasa belum benar, dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program dari pemerintah.
2. Pedistribusian yang tidak sesuai dengan jadwal, yakni menjadi keterlambatan yang tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak mengerti apa penyebab dan masalahnya.
3. Pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dirasa masih belum tepat, dimana terdapat masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapat, sedangkan yang tingkat ekonominya lebih tinggi mendapatkan bantuan tersebut.

Dalam mensukseskan program pemerintah kepada masyarakat miskin Seharusnya pengelolaan BLSM mengacu pada kriteria proses pelaksanaan program BLSM yang dicantumkan dalam buku keberhasilan program sebagai berikut ini :

1. Keberpihakan kepada rumah tangga miskin
Program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat harus tepat sasaran, agar program berjalan dengan lancar.

2. Transparansi
Keterbukaan informasi terhadap masyarakat sangat diperlukan oleh masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang program-program BLSM.
3. Partisipasi
Partisipasi pemerintah dalam program BLSM sangat penting dalam mendukung program pemerintah, sedangkan partisipasi masyarakat juga diharapkan dari pemerintah agar program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan program yang dilaksanakan.
4. Akuntabilitas dengan indikator keberhasilannya tepat sasaran
Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam mensukseskan program BLSM, yaitu keberhasilan dalam ketepatan sasaran terhadap rumah tangga miskin.

Sedangkan untuk menentukan keberhasilan program BLSM, dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi..Oleh karena itu,penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian **“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak”**.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dari pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di

Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

3. Rumusan Permasalahan

Untuk membantu beban yang dialami oleh masyarakat miskin, sangat diperlukan perhatian dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap pelaksanaan program kompensasi bagi masyarakat miskin. Masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan program kompensasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan dengan lingkup sebagai berikut “Apakah Proses Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak sudah tepat sasaran dan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku?”.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui / mendeskripsikan dan menganalisis apakah pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara (BLSM) tahun 2012 di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
2. Ingin mengetahui / mendeskripsikan dan menganalisis apakah pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2012 di

Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sudah melaksanakan kriteria dalam keberhasilan program, seperti keberpihakan kepada rumah tangga miskin, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam keberhasilan program?

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu berkaitan dengan disiplin Ilmu Pemerintahan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kota Pontianak maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat selanjutnya.

B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Kajian teori

a. Konsep Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata Bahasa Inggris “evaluation” istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal

dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English evaluasi adalah to find out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. (Arikunto, 2004:1).

Selanjutnya Dunn (1998 : 608) mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat di samakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi mempunyai fungsi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan atau program, dalam hal ini mengungkap seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

Dengan demikian evaluasi membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui apakah kaitan atau hubungan antara rancangan program dengan hasil yang dicapai.

Sugiono (1998:5) menyebutkan ada dua tipe evaluasi yaitu:

1. Summative evaluation, adalah penilaian dampak dari suatu program, disebut juga dengan evaluasi dampak (outcomes evaluation).

2. Formatif evaluation, adalah penilaian terhadap proses dari program, disebut juga evaluasi proses.

Dengan demikian, kegiatan evaluasi merupakan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai standar yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dengan nilai pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya dapat menentukan nilai akhir dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain itu Aji dan Sirat (1990:30), mengemukakan definisi evaluasi sebagai berikut:

“Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sehingga mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil dari pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mendukung maupun yang tidak mendukung suatu rencana”

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa evaluasi adalah kegiatan yang saling terkait secara rumit dari suatu proses perencanaan sampai akhir pelaksanaan suatu kegiatan.

Suchman (dalam Anderson, 1978) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari Worthen dan Sanders (dalam Anderson, 1978) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam

mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Evaluasi Program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasikan dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Tyler (1950) (dalam Arikunto,2004) mendefinisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang kerja suatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

b. Tipe Evaluasi

Berkaitan dengan penelitian mengenai evaluasi, tidak banyak ahli yang memberikan tutunan yang ideal

dalam pendekatan suatu penelitian yang berhubungan dengan evaluasi suatu program. Banyak penelitian evaluasi yang dilaksanakan hanya menekankan pada aspek dari hasil program tanpa mencoba menanyakan proses sebelum tercapainya hasil tersebut. Dalam hal ini Patton (1991:60) mengemukakan bahwa suatu proses evaluasi lebih menekankan pada bagaimana suatu hasil atau outcome diperoleh dibandingkan melihat hasil itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diktakan bahwa dalam suatu penyelenggaraan suatu program yang dievaluasi memfokuskan pada hasil dari program tersebut.

Langbein (1980:7), mengemukakan tipe-tipe evaluasi kebijakan bahwa ketika semua penelitian evaluasi memperhatikan keberhasilan program dalam bentuk hasil/akibat program, ketika studi lain berfokus pada proses dengan program dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan evaluasi menurut Langbein yaitu:

1. Metode Deskriptif.
2. Metode Causal.

Dalam teori Langbein (1980:7), penulis mendeskripsikan dalam teori ini bahwa dalam proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam mensukseskan program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat miskin.

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai

dengan rencana. Evaluasi proses mengarah pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Menggunakan metode deskriptif, proses evaluasi mengacu pada pertanyaan-pertanyaan:

1. Apakah program sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?

Selanjutnya penelitian dengan menggunakan metode sebab akibat, metode ini mengarah pada perubahan yang terjadi. Hasil/outcomes yang diharapkan pada penelitian evaluasi kebijakan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah program memberikan hasil yang diinginkan atau tidak?
2. Cara yang bagaimana pelaksanaan program dapat memberikan hasil yang terbaik?

Evaluasi merupakan tahap dimana untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu tujuan program. Tanpa evaluasi kita tidak mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dari suatu program, evaluasi juga menghasilkan feedback (umpan balik) yaitu sebagai acuan untuk membuat program baru atau untuk meneruskan program yang dilaksanakan, sehingga kecenderungan yang mengarah pada kegagalan dapat diminimalisir.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi program menurut Setiawan (1999:20), adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang. Selain itu evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak negatif maupun positif.
5. Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi

proses kebijakan kedepannya agar penyelenggaraan kebijakan kedepannya lebih baik.

Pertanyaan utama yang harus mendapatkan jawaban adalah kenapa perlu adanya evaluasi? Tentu saja untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program, evaluasi sangat diperlukan. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Berikut ini beberapa argumen perlunya evaluasi:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Kegiatan Evaluasi membutuhkan data dan informasi yang berhubungan dengan kebijakan atau program yang dijalankan sebagai bahan untuk melakukan penilaian. Penilaian terhadap suatu program tidak mungkin dilakukann tanpa ada dukungan data dan informasi. Dengan demikian, data dan informasi sangat krusial dan harus dikumpulkan semenjak kebijakan atau

program dilaksanakan. Untuk itu, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Dokumentasi dari laporan kegiatan, baik laporan tahunan, semesteran atau bulanan.
2. Survei terhadap program yang telah di implementasikan dengan mempersiapkan instrumen survei seperti daftar pertanyaan.
3. Observasi, yaitu melalui pengamatan langsung dilapangan evaluator dapat membuat penilaian tentang keberhasilan suatu program.
4. Wawancara, metode ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai para stakholders yang terlibat dalam implementasi program, terutama para kelompok sasaran.
5. Metode campuran, dari berbagai metode diatas dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan tepat.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ervina Suryani di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan tahun 2010/2011 dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan”, Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Proses, Dari penelitian ini diperoleh bahwa, masyarakat Kelurahan Kampung Baru secara umum sudah cukup paham tentang

program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, akan tetapi tingkat faktor pendidikan masyarakat dan kemampuan petugas dalam penguasaan materi dalam bantuan langsung tunai ini menjadi kendala utama dalam mensosialisasikan program bantuan langsung tunai. Penelitian yang dilakukan oleh Hartatik Efendi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara” tahun 2013/2014. Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi Proses, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESDA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan apakah sudah memberikan hasil yang diinginkan atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih saja terdapat masyarakat yang belum memenuhi syarat sebagai peserta Jamkesda dan kurangnya sosialisasi oleh petugas kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya ditandai dengan kurang cekatannya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan klaim perorangan yang diajukan oleh masyarakat atau pasien Program Jamkesda dalam melakukan transaksi biaya kesehatan yang seharusnya tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Persamaan metode penulis dengan Hartatik Efendi adalah

perbedaan metode dalam skripsi ini proses pelaksanaan dan hasil.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pelaksanaan

Langbein (1980:7), mengemukakan tipe-tipe evaluasi kebijakan bahwa ketika semua penelitian evaluasi memperhatikan keberhasilan program dalam bentuk hasil/akibat program, ketika studi lain berfokus pada proses dengan program dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan evaluasi menurut Langbein yaitu, Metode Deskriptif dan Metode Causal. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses mengarah pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Sehubungan dengan uraian diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi kriteria dalam melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat adalah :

1. Prosedur pelaksanaan
2. Keberpihakan kepada rumah tangga

3. Transparansi
4. Partisipasi
5. Akuntabilitas dengan indikator tepat sasaran

2. Keberpihakan Kepada Rumah Tangga Miskin

Dalam point keberpihakan kepada rumah tangga miskin, realita yang terjadi di lapangan, masyarakat masih banyak mengeluhkan tentang program BLSM, khususnya pada penerimaan dana bantuan BLSM ini, yang mana masih terdapat masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, masih terdapat protes-protes masyarakat kepada aparatur pemerintah, faktor-faktor ini yang menyebabkan bahwa ketidak tepatan terhadap rumah tangga miskin. Masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan dana BLSM tidak dapat, sedangkan masyarakat yang dirasa mampu, malah mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.

3. Trasparansi

Dalam ponit trasparasi pada program BLSM ini, hasil survey dilapangan bahwa masih terdapat msyarakat pro dan kontra terhadap berlangsungnya program BLSM ini, masyarakat yang pro dalam berlangsungnya program BLSM ini, masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang adanya program BLSM, sedangkan masyarakat yang kontra dalam proses pelaksanaan program BLSM ini, masyarakat yang tidak mengetahui atau tidakkeperdulian terhadap

informasi-informasi program BLSM, sehingga mereka beranggapan bahwa dari pihak pemerintah tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dana BLSM.

4. Partisipasi

Di point Partisipasi, terdapat kasus pada masyarakat dalam antusias masyarakat terhadap proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, antusias masyarakat terdapat program BLSM sangat tinggi di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak, karena berdasarkan data yang diperoleh bahwa masyarakat miskin di wilayah Pontianak Timur paling besar, sehingga antusias masyarakat di Kelurahan Dalam Bugis sangat tinggi. Tetapi dalam kenyataan realitanya masih banyak terdapat warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dikarenakan persyaratan untuk menerima bantuan dana BLSM ini tidak dimiliki oleh warga miskin, sehingga masih banyak warga miskin yang tidak ikut berpartisipasi dalam program BLSM ini.

5. Akuntabilitas Dengan Indikator Tepat Sasaran

Dalam hal tujuan yang diinginkan keberhasilan dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ini salah satunya keberpihakan terhadap rumah tangga miskin, aparatur pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan program BLSM ini. Dalam pendataan terhadap masyarakat

miskin yang layak menerima bantuan dari pemerintah, agar kedepannya tidak terjadi dalam ketidaktepatan terhadap rumah tangga miskin, serta aparatur pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak PT.Pos Indonesia dalam menyelenggarakan program BLSM. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti peroleh, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak" maka dapat disimpulkan:

1. Pada dasarnya pelaksanaan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak belum sepenuhnya optimal dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria untuk keberhasilan dalam pelaksanaan program BLSM ini, dikarenakan kendala-kendala yang

ditemukan dalam pelaksanaan program BLSM, tetapi di pihak pemerintah sudah melakukan dengan baik.

2. Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal, hal ini ditandai dengan kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah dalam menjalankan proses pelaksanaan program BLSM ini, seperti keberpihakan kepada rumah tangga miskin, masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.
3. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ini dirasa belum tepat sasaran terhadap rumah tangga miskin, masih banyak terjadi hambatan/masalah yang terjadi dalam pendataan dan proses pelaksanaan program BLSM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Abdullah, Syukur. 1987. Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan. Makassar : Persadi
- Anderson, James E. 1997. Public Policy-Making. Third edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Anderson, Scarvia B & Samuel Ball. 1978. The Profession and Practice of Program Evaluation. San Francisco: yossey Bass Publishers.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Langbein, Laura Irwin. 1980. Discovering Whether Program Work : A Guide To Statistical Methods For Program Evaluation. California : Goodyear Publishing Company.
- Mannulang, M. 1987. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Meolong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2006. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Patton, Michael Quinn. 1991. How to Use Qualitative Methods in Evaluation. SAGE Publications.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Langsung Sementara Masyarakat Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan”, Skripsi.

Efendi Hartatik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara tahun 2013/2014 dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara”, Skripsi.

Undang-Undang

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 12 Tahun 2005, tentang Bantuan Tunai kepada rumah tangga-rumah tangga miskin.

Skripsi

Ade Ervina Suryani di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimoon Kota Medan tahun 2010/2011 dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AGUS RIZKI KURNIAWAN
NIM / Periode lulus : E42010077 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : agusrizki2891@gmail.com / 085348153833

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA
MASYARAKAT DI KELURAHAN DALAM BUGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

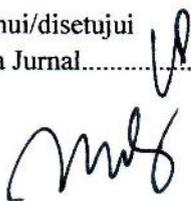
- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

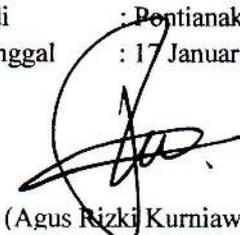
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....


Dr. H. Wijaya Kusuma, MA

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 17 Januari 2015


(Agus Rizki Kurniawan)